

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2 0 1 8



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	Kompas	Sindo	Tempo
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		Indopos	Pos Kota	Warta Kota

Bekasi Minta Dana Sampah ke DKI Rp 2 Triliun

Wajib Atau Sukarela?

Persoalan sampah kota besar kembali mengemuka setelah Pemkot Bekasi mengancam akan menolak sampah kiriman dari Jakarta ke TPST Bantargebang. Ini lantaran proposal dana bantuan kemitraan dari Bekasi belum disetujui oleh Pemprov dan DPRD DKI.

BEKASI – Kisruh pengelolaan sampah antara Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi, Jawa Barat, kembali terjadi.

Kali ini Pemkot Bekasi mengancam akan menutup Tempat Penampungan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang apabila DKI Jakarta tidak segera mengambil keputusan soal dana hibah kemitraan yang diusulkan Rp2,09 triliun pada tahun ini. Di sisi lain, Pemprov DKI menyatakan telah menyelesaikan kewajiban senilai Rp194,8 miliar sebagai dana kompensasi sesuai perjanjian dua belah pihak.

Belum ada kepastian soal dana hibah kemitraan ini membuat Pemkot Bekasi berang. Imbasnya, jam masuk truk pengangkut sampah dari Jakarta ke Bantargebang dibatasi, hanya pada jam 21.00-5.00 WIB. Biasanya sebelum kisruh tersebut truk-truk tersebut bebas beroperasi 24 jam penuh.

Dinas Perhubungan Kota Bekasi juga mendapat instruksi dengan mencegat puluhan truk sampah DKI yang hendak menuju Bantargebang pada Rabu (17/10) dan Jumat (19/10).

Mulai hari ini Pemkot Bekasi bahkan mengancam akan menindak tegas truk sampah dari DKI Jakarta yang melintas apabila tidak ada kesepakatan dengan DKI Jakarta. Truk sampah jenis tronton, dump truck, dan arm roll tidak diperbolehkan melintasi ruas Jalan Ahmad Yani via Gerbang Tol (GT) Bekasi Barat selama 24 jam penuh. Kendaraan pengangkut sampah hanya diperbolehkan melintas di Jalan Raya Transyogi atau Alternatif Cibubur, Jalan Ahmad Yani via GT Bekasi Barat dan Jalan Cipendawa via GT Jatiasih. Namun, khusus untuk jenis truk jenis compactor, masih bisa melewati jalan utama karena desain truknya tertutup sehingga air tidak menetes di jalan.

Pihak Pemprov DKI Jakarta menyatakan baru membahas usulan dana hibah kemitraan yang jumlah dananya membengkak dari semula Rp1 triliun itu. Dana tersebut dipastikan tidak akan cair tahun ini karena masih butuh perincian lengkap soal penggunaan anggarannya.

“Bantuan keuangan itu berdasarkan peraturan menteri dalam negeri sifatnya tidak wajib. Ini bentuknya kan kemitraan dan harus disesuaikan kemampuan keuangan kami,” kata Kepala Biro Tata Pemerintahan DKI Jakarta Premi Lestari di Jakarta kemarin.

Gubernur DKI Anies Baswedan pun bersikukuh bahwa DKI sudah melakukan kewajibannya secara tertib pada Mei lalu. Terkait proposal dana hibah kemitraan yang diusulkan Bekasi, Anies melihat bahwa hal itu bukan lagi masalah sampah.

“Soal dana hibah kemitraan itu belum jelas perinciannya. Ini masalah APBD Kota Bekasi yang sebagian tanggung jawabnya dilimpahkan ke Pemprov DKI Jakarta. Ini di luar persampahan minta bantuan ke DKI,” kata Anies.

Premi Lestari menambahkan, usulan yang disampaikan oleh Pemkot Bekasi pada 15 Oktober 2018 itu masih akan dibahas terlebih dahulu bersama DPRD DKI. Hal ini karena Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2019 baru berjalan.

Di bagian lain, Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi mendesak agar DKI Jakarta membuat keputusan dan memberikan permintaan atau usulan dari Kota Bekasi terkait kompensasi ke-

beradaan tempat sampah milik DKI Jakarta tersebut di Bekasi.

“Saya kira kalau tidak ada keputusan, akan berlanjut (penghentian truk), jangankan dihentikan, ditutup juga bisa,” ujarnya.

Menurutnya, sebetulnya kompensasi dari keberadaan TPST Bantargebang yang diberikan kepada Kota Bekasi tidak sebanding sebab keberadaan TPST Bantargebang cukup mengganggu warganya, khususnya di Kecamatan Bantargebang. “Ribuan warga di sana mengeluhkan keberadaan TPST ini,” katanya.

Karena itu, kata dia, butuh komitmen dalam perjanjian kerjasama yang telah dibuat sehingga ada kontrak perjanjian kerja sama yang harus dipahami dan harus sama-sama dilakukan tentang hak kewajibannya. “Perlu dilakukan perjanjian kerja sama ulang terkait keberadaan TPST Bantargebang,” ucapnya.

Dia mengakui polemik keberadaan TPST Bantargebang ini pernah bergulir sejak beberapa tahun silam. Namun, karena ada kesepakatan dengan Pemprov DKI, hal itu bisa diselesaikan dengan baik.

Wakil Wali Kota Bekasi Tri Adhianto Tjahyono berharap anggaran kemitraan itu dimasukkan Pemprov DKI Jakarta pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta 2019. Menurutnya, anggaran ini sangat dibutuhkan untuk in-

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2 0 1 8



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	Kompas	Sindo	Tempo
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		Indopos	Pos Kota	Warta Kota

Bekasi Minta Dana Sampah ke DKI Rp 2 Triliun

frastruktur penunjang truk DKI menuju TPST Bantargebang.

"Kita sangat kecewa dengan Pemerintah DKI saat ini karena anggaran yang dikucurkan senilai Rp194 miliar hanya untuk kompensasi Bantargebang, bukan untuk kebutuhan infrastruktur lainnya," ungkapnya.

Untuk itu, Trimendesak agar DKI Jakarta memikirkan usulan dana kemitraan untuk daerah penampung sampah DKI Jakarta.

Terkait usulan dana hibah kemitraan tersebut, Pemkot Bekasi mengalokasikan untuk sejumlah pembangunan infrastruktur pendukung antara lain flyover Cipendawa senilai Rp372 miliar, flyover Rawapanjang senilai Rp188 miliar, pembangunan saluran bawah tanah Buaran Rp16,4 miliar, dan peningkatan fasilitas penerangan jalan umum Rp5 miliar.

Selain itu, dana hibah untuk kompensasi Bantargebang juga rinciannya adalah bantuan langsung tunai Rp70 miliar, pembangunan folder air Ciketing Udik Rp280 miliar, Puskesmas Bantargebang Rp10 miliar, pembuatan IPAL bersama Rp28 miliar, dan sejumlah kegiatan lain mencapai Rp5 miliar.

Dinilai Berlebihan

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Muhammad Taufik meminta Pemkot Bekasi memahami aturan pencairan dana hi-

bah. Menurutnya, untuk mengeluarkan dana hibah, mekanisme penganggaran yang harus dilakukan Pemprov DKI Jakarta.

Wakil Ketua Badan Anggaran DPRD DKI Jakarta itu pun menilai dana hibah yang diajukan Pemkot Bekasi sebanyak Rp2,09 triliun terlalu berlebihan. Dia meminta agar Pemkot Bekasi tidak mengeluarkan ancaman terkait distribusi sampah DKI Jakarta ke TPST Bantargebang.

Sementara itu, pengamat perkotaan Universitas Trisakti Nirwono Jogamenuturkan, penanganan sampah di Bantargebang hanya berorientasi proyek. Dia menilai, pengelolaan sampah DKI hanya mengumpulkan, mengangkut, dan membuangnya ke Bantargebang lantaran ada anggaran yang menggiurkan.

Padahal, lanjut Nirwono, ada hal yang penting yang harus dilakukan dalam pengelolaan sampah. Untuk mengelola sampah harus dilakukan sejak awal di lingkungan rumah tangga secara berjenjang. "Kalau hal itu dilakukan, lebih dari 50% sampah organik sudah selesai diolah menjadi kompos untuk kebutuhan pupuk di lingkungan. Sisa-sisa anorganik, dengan adanya bank sampah akan didapat sampah daur ulang," ujarnya.

● **abdullah m surjaya/ bima setiyadi/ant/ sindonews**



Feb

Pemkot Bekasi meminta bantuan dana dari Pemprov DKI untuk pembangunan sejumlah proyek senilai **Rp1 triliun**.

Mei

Pemrov DKI meminta rincian anggaran berbagai proyek tersebut.

26 Sep

Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi kembali membatasi jam operasional truk sampah DKI yang melewati Bekasi Barat. Berlaku mulai 22 Okt.

17 Okt

Puluhan truk sampah dari DKI dihentikan Pemkot Bekasi setelah keluar gerbang tol Bekasi Barat.

18 Okt

Pemkot Bekasi baru memberikan rincian anggaran dana kemitraan namun nilainya dinaikkan menjadi **Rp2,09 triliun**, dari semula Rp1 triliun.

19 Okt

Rahmat Effendi mengancam akan menghentikan kerja sama apabila Pemprov DKI tidak mengabulkan proposalnya.

21 Okt

Gubernur DKI Anies Baswedan meminta Pemkot Bekasi tidak mencampurkan bantuan wajib dan bantuan kemitraan yang bersifat sukarela.

DANA HIBAH PEMPROV DKI KE PEMKOT BEKASI

● **Dana Bantuan Khusus/Wajib** (kompensasi bau) Bantuan langsung tunai, pemulihan lingkungan, penanggulangan sampah dan pelayanan kesehatan warga yang terdampak sampah TPST Bantargebang

2016	Rp143 miliar
2018	Rp194,8 miliar (termasuk utang 2017)
2019	Rp141 miliar (Sudah disetujui dan akan dicairkan pada 2019)

● **Dana Bantuan Umum/Sukarela** (hibah kemitraan)

2015	Rp90 miliar
2016	Rp200 miliar
2017	Rp250 miliar
2018	Rp2,09 triliun*

*Belum disetujui

Produksi Sampah DKI per hari

